

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat desa sekitar hutan merupakan bagian dari masyarakat dunia yang tidak terlepas dari aktivitas dinamika budaya yang berlangsung terus menerus terjadi (Kristin et al., 2018). Kesejahteraan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan dan sumber daya alam. Di Indonesia banyak daerah yang bergantung pada sumber daya hutan, kesejahteraan masyarakat lokalnya juga sering kali terkait erat dengan pengelolaan hutan dan akses tentang sumber daya alam (Haryani & Rijanta, 2019). Kesejahteraan ini mencakup beberapa aspek yakni ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas hidup dan dapat juga melestarikan lingkungan.

Tingkat pendapatan masyarakat sekitar hutan yang berada di Indonesia masih tergolong rendah dan masuk dalam indikator tahap kemiskinan. Hampir 25.383 desa di Indonesia berada di sekitar kawasan hutan (23.81% dari seluruh desa di Indonesia) terdapat 48.8 juta jiwa dan 10.2 juta diantaranya tergolong kategori miskin. Dari total penduduk Indonesia 36,73% dan 6 juta sumber penghasilannya langsung pada sumber daya hutan 3,4 juta di antaranya pada sektor kehutanan (BPS 2018). Provinsi Jambi memiliki 915 desa sekitar dan dalam kawasan hutan 152.030 jiwa masyarakat berada garis kemiskinan adapun upayah dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan, pemerintah melakukan program perhutanan sosial dengan melalui 5 skema perhutanan sosial.

Dalam upayah mengurangi angka kemiskinan di Indonesia pada kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah telah mengembangkan program perhutanan sosial. Sebanyak 12,7 juta kawasan hutan di cadangkan untuk mendukung program ini, termasuk 300.000 hektar di Provinsi Jambi. Perhutanan sosial adalah pendekatan pengelolaan secara berkelanjutan yang di lakukan di kawasan hutan oleh masyarakat setempat. Tujuannya mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap budaya setempat. Perhutanan di tetapkan menjadi 5 skema yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat serta kemitraan kehutanan.

Hutan Adat Talun Sakti terletak di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, dan merupakan suatu kawasan hutan yang di kelola oleh masyarakat adat setempat. Kawasan Hutan Adat Talun Sakti Muara Seluro merupakan bagian dari Kawasan Hutan Lindung Bukit Tinjau Limung yang terletak dalam wilayah administratif Desa Raden Anom. Secara geografis terletak antara Lintang Selatan $02^{\circ}33'30''S$, Lintang Utara $02^{\circ}3'0''S$, Bujur Timur $102^{\circ}18'0''E$, Bujur Barat $102^{\circ}15'30''E$ dengan seluas 641 Ha. Hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya alam yang vital, tetapi juga memiliki budaya yang spiritual bagi masyarakat. Hutan Adat Talun Sakti memiliki peran dalam menyediakan kebutuhan seperti bahan makanan, obat-obatan dan bahan bangunan. Status hukumnya yaitu sebagai hutan adat dan memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan, serta mempengaruhi pola hidup dan kesejahteraan mereka.

Meskipun Hutan Adat Talun Sakti memberikan manfaat bagi masyarakat mereka juga menghadapi banyak tantangan yang banyak mempengaruhi kesejahteraannya. Permasalahannya yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, belum optimalnya pemanfaatan yang sudah ada, kurangnya pendampingan terhadap masyarakat (Toha et al., 2023). Akses layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang cukup juga dapat berperan serta dalam rendahnya tingkat kesejahteraan. Menurut (Saprianto et al., 2023) masyarakat di daerah terpencil sering kali kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik, hal ini akan berdampak negatif bagi kehidupan mereka. Perubahan iklim dan harga produk yang di hasilkan yang mengalami perubahan juga memperburuk situasi, yang membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan besar mereka dan kembali ke cara hidup tradisional mereka. (Agustin et al., 2024) menyatakan bahwa perubahan iklim pada curah hujan yang begitu tinggi dan produktivitas pertanian akan mempengaruhi ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi hambatan yang utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan adat. Dengan pendidikan yang rendah sering hanya mampu mengakses pekerjaan sektor informal atau kasar dan memiliki pendapatan yang rendah dan tidak memiliki perlindungan yang memadai. Kondisi tidak hanya memperburuk kondisi kemiskinan tetapi juga

mempersempit peluang dan keluar dari siklus tersebut. Menurut (Meidiana & Marhaeni, 2019) pendidikan memiliki pengaruh terhadap produktivitas dan kemampuan secara individu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Selain itu, pendidikan yang rendah juga berdampak pada rendahnya pemahaman tentang kesehatan, gizi dan kebersihan. Menurut (Adriana, 2020) menunjukkan bahwa keluarga dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak memperdulikan layanan kesehatan dan keluarga berencana. Hal ini memperparah kondisi kesehatan dan membebani kondisi ekonomi masyarakat sekitar hutan adat talun sakti.

Menurut badan pusat statistik (BPS Indonesia, 2022), Desa sekitar hutan adat Talun Sakti Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun memiliki potensi pada sektor perkebunan. Dengan adanya hutan adat ini mampu memberikan kesejahteraan masyarakat setempat, masyarakat yang dikatakan sejahtera apabila kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Dari kesejahteraan masyarakat dapat mencerminkan kualitas masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi berarti memiliki kehidupan yang baik dan pada akhirnya keluarga tersebut mampu memberikan kondisi yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pengukuran suatu tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan adat Talun Sakti Kecamatan Batang Asai kabupaten Sarolangun, diperlukan indikator yang dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat. Salah satu bentuk indikator kesejahteraan masyarakat sekitar hutan adat Talun Sakti Kecamatan Batang Asai yakni berupa kegiatan pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pengelolaan jernang, minyak tengkawang, minyak ketapang, minyak kepayang dan keripik rebung. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari penghasilan keluarga dan indikator-indikator yang mengarah kepada badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN). Indikator bada kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) tidak memberikan ukuran yang lebih langsung tentang keluarga miskin pada tingkat nasional dan tingkat administratif yang lebih rendah (desa) dan pada tingkat keluarga melainkan memberikan ukuran tentang seberapa sejahtera keluarga tersebut (Rambe et al., 2008).

Penghasilan yang di dapatkan dari penghasilan pokok maupun penghasilan sampingan, penghasilan sampingan dapat diperoleh dari anggota keluarga yang bekerja guna untuk membantu agar penghasilan keluarga dapat ditingkatkan dan dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Berdasarkan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN 2020) kriteria indikator kesejahteraan masyarakat di rangkum menjadi dua belas, variabel yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, agama/religi, penghasilan, interaksi dalam keluarga, kemudahan berinteraksi sosial dengan lingkungan, dan kemudahan mencari informasi dan komunikasi, serta memiliki peran aktif dalam masyarakat. Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) membagi tingkat kesejahteraan menjadi lima kelompok, yaitu keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I, II, III dan keluarga sejahtera III-plus.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat kesejahteraan, sehingga penulis akan melakukan Penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan Adat Talun Sakti Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis membuat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar Hutan Adat Talun Sakti Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar Hutan Adat Talun Sakti Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar Adat Talun Sakti Kecamatan batang Asai Kabupaten Sarolangun.
2. Menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar Hutan Adat Talun Sakti Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

1.4 Manfaat Penelitian

Memperkaya pengetahuan tentang Perhutanan Sosial dan efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Perhutanan Sosial, melestarikan adat dan budaya masyarakat adat, memperkuat hutan adat.